

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN RELIGI DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Dea Istiqomah¹, Wawan Risnawan², Ahmad Juliarso³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : deaistiqomah3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya proses kolaborasi dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Hal ini dibuktikan dengan belum berjalan optimal pelaksanaan kolaborasi dan pengelolaan berkelanjutan dalam pengembangan wisata baik dari segi alur prosedur pengelolaan dan struktur organisasi pengelola, pemerintah desa belum menjalin belum melibatkan pihak swasta, kurangnya komitmen dan partisipasi diantara institusi dalam proses kolaborasi, serta terbatasnya sumber dana pemerintah desa.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara dan informan sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran belum berjalan optimal hal ini terlihat dari 12 indikator yang dijadikan tolak ukur, 11 diantaranya belum optimal. Hambatan yang terjadi ialah kurangnya kerja sama, kurangnya intensitas diantara institusi, belum ditentukan jangka waktu kolaborasi, kurangnya tugas dan peran antar institusi, minimnya sumber daya. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan komunikasi dan komitmen, musyawarah untuk menentukan arah kolaborasi, serta memaksimalkan tugas dan peran antar institusi.

Kata Kunci : Kolaborasi, Institusi, Pengembangan

PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam pembangunan pedesaan adalah pengembangan pariwisata di pedesaan. Pariwisata dianggap memiliki potensi yang besar untuk pembangunan sosial ekonomi dan regenerasi daerah

pedesaan. Tren wisata saat ini mengarah pada eksplorasi alam, padahal lebih dari itu banyak dan jenis wisata seperti wisata budaya, wisata religi, wisata pertanian, wisata cagar alam, dan wisata buatan lainnya.

Setiap daerah memiliki potensi

wisata yang dapat dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana liburan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Selain itu jenis wisata edukasi seperti objek wisata budaya dapat meningkatkan pengenalan dan pelestarian Budaya.

Pengembangan kewenangannya berada pada pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum kewenangan dan kewajiban untuk menggali potensi pariwisata. Dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata harus melibatkan semua lapisan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Desa Panyingkiran merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ciamis. Bukan hanya menyuguhkan keindahan alam yang indah dengan pemandangan jembatan Cirahong dan sungai Citanduy, tetapi juga adanya wisata budaya seperti pencak silat, kampung angklung, selain itu ada juga wisata budaya berupa ekonomi kreatif kerajinan tangan dari lidi yang sudah ekspor keluar negeri. Wisata yang lainnya yaitu adanya

wisata religi. Wisata religi yang ada di desa Panyingkiran yaitu terdapat beberapa makam syekh, seperti Syekh Abu Sahar dan Syekh Abdul Wajah.

Kerjasama antar institusi yang terlibat dalam pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Panyingkiran belum diperhatikan. Rendahnya kolaborasi dan sinergi antara institusi membuat potensi wisata yang ada di Desa Panyingkiran tidak berkembang sepenuhnya. Pemerintah Desa memiliki keterbatasan apabila semua program pemerintah dilakukan oleh sendiri, oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dengan institusi yang lain sehingga potensi wisata akan mendapat perhatian oleh institusi atau lembaga yang mengelolanya.

Keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa seperti sumber daya finansial menjadi persoalan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena dalam konsep *collaborative governance* pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor yang berperan tetapi keterlibatan masyarakat dan pihak swasta menjadi penunjang utama pemenuhan pencapaian tujuan dan bisa memberikan manfaat.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata yang ada di desa panyingkiran belum optimal, terlihat dari indikator – indikator

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketentuan alur prosedur pengelolaan struktur organisasi pengelola dibuktikan dengan belum berjalan dengan optimal dalam hal pelaksanaan kolaborasi dan pengelolaan berkelanjutan dalam pengembangan wisata.
2. Pemerintah desa belum sepenuhnya bermitra dengan institusi lain yang Berkepentingan dalam pengembangan wisata hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya partisipasi baik pemerintah daerah maupun pihak swasta.
3. Kurangnya komitmen diantara institusi terkait dalam proses kolaborasi untuk pengelolaan wisata di Desa Panyingkiran dibuktikan dengan kurangnya partisipasi dari institusi seperti POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang diberikan tugas dan wewenang oleh pemerintah Desa untuk mengelola wisata yang ada di Desa Panyingkiran.
4. Minimnya promosi potensi wisata yang ada di Desa Panyingkiran kepadakhalayak
5. Terbatasnya sumber dana pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wisata hal ini dibuktikan dengan terbaginya dana desa dengan program desa yang lain yang

sudah dicantumkan di RPJM Desa seperti pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan, pembangunan, dan dana tak terduga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses kolaborasi antar institusi pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, 1 orang Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, 1 orang sebagai Sekretaris Desa Panyingkiran, 1 orang Ketua BUMDES, 1 orang sebagai Ketua POKDARWIS sekaligus pengelola Kampung Angklung, 1 orang pemilik ekonomi kreatif kerajinan tangan dari lidi, dan 1 orang sebagai Pengurus Situs Makam Syekh Abu Syahar (Eyang Abu Syahar) dan Pencak Silat. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata budaya dan religi yang ada di desa Panyingkiran berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2015: 251 – 258) bahwa kolaborasi adalah perpaduan unsur – unsur tertentu yang dapat menghasilkan proses yang lebih baik apabila dapat dibangun dengan beberapa unsur yaitu:

1. Sifat Kerja Sama;
2. Intensitas;
3. Jangka waktu;
4. Kedudukan para pihak;
5. Manfaat dan risiko;
6. Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan.

Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1) Sifat Kerja Sama

- a. Kerja sama melibatkan para pemangku kepentingan seperti institusi atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata bukan hanya pada peran pemerintah pusat ataupun daerah, melainkan peran keseluruhan aktor yang berada di dalam masyarakat pariwisata yang memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mampu diwujudkan apabila kerjasama keseluruhan institusi yang terlibat dalam kolaborasi dapat terlaksana dengan baik, atau dengan istilah lain

terwujudnya *Collaborative*

Governance. Tetapi pada realisasinya pemerintah desa belum melibatkan institusi swasta dalam proses kolaborasi. Sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sedarmayanti (2003: 5) bahwa :

“Institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing”.

Hambatan yang terjadi dalam proses kerja sama minimnya proses komunikasi, sehingga kerja sama dilakukan tidak berkelanjutan serta kurangnya motor penggerak yang mengkoordinir proses kolaborasi antar instiusi yang terlibat dalam pengembangan wisata. Adapun upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menumbuhkan kembali komunikasi yang merupakan hal krusial dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam pelaksanaan kolaborasi, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor kolaborasi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil penelitian pada indikator kerjasama melibatkan setidaknya lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah (swasta) belum terjalin dengan optimal karena kolaborasi belum melibatkan 3 unsur aktor kolaborator yaitu belum bekerja sama dengan pihak swasta.

- b. Kerja sama dituangkan dalam bentuk tertulis (dasar hukum).

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya kerja sama dituangkan dalam bentuk tertulis (dasar hukum) belum optimal karena dasar hukum hanya dimiliki oleh masing – masing objek wisata saja tetapi tidak ada tindak lanjut atas pembuatan dasar hukum secara tertulis (*written agreements*) bagaimana proses kolaborasi antar institusi yang terlibat, pembagian tugas dan wewenang, pencapaian tujuan, perencanaan visi misi dalam pengembangan wisata karena belum diadakannya rapat secara formal sehingga tidak ada kesepakatan bersama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dapat dijadikan bahan untuk dibawa ke ranah hukum. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosen (1993: 218) mengatakan bahwa bentuk-bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Hambatan dalam penyusunan dasar hukum kolaborasi adalah belum dilakukannya rapat secara formal yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan institusi

yang terlibat dalam pengembangan objek wisata terkait dengan bagaimana proses berjalannya kolaborasi, pencapaian tujuan, perencanaan visi dan misi. Sehingga

belum ada kesepakatan atau yang biasa dikenal dengan MoU (*Memorandum of Understanding*). Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah diadakannya rapat dengan tujuan pembuatan kesepakatan dalam proses kolaborasi seperti anggota yang terlibat, pembagian tugas dan wewenang, pencapaian tujuan, perencanaan visi misi, dsb.

2) Intensitas

- a. Adanya komitmen dari para institusi yang terlibat dalam pengembangan objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator komitmen dari para institusi yang terlibat dalam pengembangan objek wisata belum optimal, dikarenakan kesibukan masing – masing pengurus sehingga fokus dalam menjalankan tugas pekerjaan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini tidak sesuai dengan 5 komponen kolaborasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Friend and Cook (2010) (dalam Choirul Saleh, 2020: 37-38) salah satunya ialah komponen personal commitment yaitu:

“Personal commitment (komitmen personal), yakni sebuah janji setia atau kepatuhan dari masing-masing anggota kolaborasi dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.”

Adapun hambatan dalam membangun komitmen dari para institusi yang terlibat dalam pengembangan objek wisata adalah

alasan personal baik itu kesibukan masing – masing pengurus ataupun alasan lainnya, terbatasnya kegiatan rapat yang diadakan 6 bulan sekali juga menyebabkan berkurangnya rasa saling memiliki antar anggota dalam suatu organisasi sehingga penurunan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Maka upaya yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kembali komitmen dari para institusi (pengurus). Komitmen merupakan bentuk tanggungjawab dari tugas dan peran yang harus dilakukan.

Proses kolaborasi akan berjalan optimal karena individu memahami dan melaksanakan komponen yang akan berpengaruh dalam keberhasilan kolaborasi salah satu diantaranya yaitu komitmen personal (*personal commitment*).”

- b. Adanya rapat mingguan atau bulanan untuk evaluasi proses kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator adanya rapat mingguan atau bulanan untuk evaluasi proses kolaborasi belum optimal karena evaluasi hanya dilakukan seperlunya dengan cara komunikasi informal tidak dengan agenda khusus secara formal yang dihadiri oleh institusi yang terlibat dalam kolaborasi secara rutin dan berkesinambungan.

Hal ini tidak sesuai dengan relevan dengan pendapat menurut Friend and Cook (2010) (dalam Choirul Saleh, 2020: 37-38) bahwa

salah kolaborasi harus membentuk 5 komponen, salah satunya yaitu:

“*Interaction processes* (proses interaksi), yaitu setiap anggota kolaborasi dituntut untuk saling berinteraksi secara efisien dan efektif, terkait dengan pelaksanaan kerja, baik atas pekerjaan yang bersifat rutin maupun tidak rutin.”

Hambatan yang terjadi karena pengembangan wisata direncanakan dalam RPJM Desa pada tahun ke 3 – 4 masa jabatan Kepala Desa sehingga tidak menjadi prioritas utama karena berfokus pada bidang yang lain, sehingga evaluasi ataupun komunikasi hanya dilakukan seperlunya dengan cara tidak formal sebatas komunikasi 2 arah antara pemerintah desa dengan pengelola wisata.

Upaya yang dapat dilakukan seyogyanya diagendakan secara khusus terkait melaksanakan musyawarah bersama institusi yang terlibat dalam pengembangan wisata yang ada di Desa Panyingkiran.

3) Jangka Waktu

- a. Adanya rencana visi misi bersama dalam yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator perencanaan visi misi belum optimal karena belum pernah dilakukan musyawarah secara formal antara institusi yang terlibat dalam proses kolaborasi. visi misi merupakan langkah awal akan dibawah kemana arah kolaborasi berlangsung oleh karena itu perlu untuk direncanakan

berdasarkan kesepahaman dan kesadaran antara semua anggota yang terlibat dalam kolaborasi.

Sebagaimana menurut Senge (2017: 154) bahwa membangun suatu memiliki disiplin kunci, yaitu:

“Visi bersama adalah suatu visi yang kebanyakan anggota kelompok / himpunan / organisasi komit dengan tulus, karena mencerminkan pribadinya masing – masing. Visi pribadi yang merupakan kesepakatan bersama yang dapat menciptakan identitas bersama serta mampu menghubungkan ratusan bahkan ribuan orang. Perlu untuk membangun komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan praktek yang menuntun kita mencapai tujuan masa depan tersebut.”

Hambatan belum direncana visi misi bersama dalam yang sudah ditentukan karena dalam RPJM Desa waktu dalam pengembangan wisata ialah tahun ke 3 – 4 dalam satu periode, belum direncanakan dan berfokus pada program pemerintah desa yang lain. Maka upaya yang dapat dilakukan ialah membuka pandangan bahwa pariwisata merupakan sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan terhadap perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu perlu tindak lanjut dalam pengembangannya dengan cara setiap institusi harus menyatukan persepsi dan tujuan yang sama dalam proses kolaborasi untuk pengembangan wisata, jika ada perbedaan maka harus dipilih alternatif

terbaik tanpa ada yang merasa dirugikan bahkan pilihan tersebut dapat bermanfaat dan diterima oleh semua anggota. Setiap anggota harus berbagi pemahaman atas persoalan yang dihadapi, memberikan saran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pengembangan objek wisata.

b. Adanya orientasi jangka waktu dalam kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian menurut pandangan peneliti bahwa jangka waktu kolaborasi dalam pengembangan objek wisata antara pemerintah desa dengan institusi yang terlibat belum optimal karena proses pengembangan hanya dilakukan secara komunikasi informal belum ditentukan jangka waktu kolaborasi secara intens yang berkelanjutan. Hal ini tidak relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Dewi (2011:7) mengatakan bahwa “manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi saalah satu sumber daya unjuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola agar sebuah tugas dapat dikerjakan secara efektif dan efisien.”

Tetapi untuk kolaborasi antara pemerintah daerah maupun dinas pariwisata Kabupaten Ciamis dilakukan secara langsung dengan pengelola objek wisata yang ada dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan seperti hari jadi Ciamis, pameran, festival, dan event

yang lainnya.

Kolaborasi memiliki tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama.

4) Kedudukan para pihak

a. Adanya struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator adanya struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas belum optimal karena sudah dibentuk institusi dan pembagian tugas dalam namun pasif dalam pelaksanaannya. Kurangnya komunikasi, koordinasi, kesadaran hak dan kewajiban, serta kesibukan masing – masing anggota membuat struktur organisasi tersebut terhambat dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan sebuah kolaborasi dalam mengerjakan tugas dan fungsinya dapat dilakukan dan diraih apabila setiap anggota mempunyai strategi yang dianggap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu, setelah itu saling percaya terhadap sesama tim berdasarkan asas saling mengawasi. Sebagaimana pendapat Nawawi (1984: 7) mengungkapkan bahwa:

“Kolaborasi adalah usaha untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.”

Hambatan dalam pembagian tugas dan wewenang seluruh institusi dalam proses kolaborasi karena institusi yang terlibat pasif dalam pelaksanaannya.. Sudah ada institusi yang dibentuk sesuai tugas dan fungsinya masing – masing tetapi tidak sepenuhnya dilakukan karena tidak ada motor penggerak kemana arah kolaborasi akan dibawa. Maka upaya yang dapat dilakukan ialah dengan dibangun dan dievaluasi kembali struktur organisasi pembentukan kolaborasi.

b. Adanya kesetaraan dan sinergitas institusi dalam kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian menurut pandangan peneliti, indikator kesetaraan dan sinergitas institusi dalam kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena pemerintah desa belum bisa merangkul dan menggerakkan institusi lain yang terlibat untuk bekerja sama dalam berlangsungnya kolaborasi. BUMDES, POKDARWIS, serta pengelola objek wisata berjalan masing – masing tidak berhimpun bersama untuk saling bersinergi karena tidak mengetahui arah kebijakan kolaborasi hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara setiap institusi.

Hambatan yang dihadapi karena

pemerintah desa belum bisa merangkul pihak – pihak yang terlibat dan menguntungkan dalam kolaborasi. Permasalahan yang berat dan rumit tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain. Pemerintah Desa belum menggerakkan institusi agar ikut serta dalam kolaborasi. Maka upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin komunikasi dengan pihak – pihak yang menguntungkan sehingga tercipta sinergitas diantara semua pihak, dengan demikian hubungan antar pihak dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Najianti (dalam Rahmawati, dkk. 2014: 637), terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi:

1. Komunikasi, Komunikasi adalah suatu pengiriman pesan atau simbol - simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat suatu proses, terdapat simbol - simbol, dan symbol-simbol itu mengandung arti. Arti atau makna simbol disini tentu saja tergantung pada pemahaman dan persepsi komunikan. Oleh karena itu komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai, apabila masing-masing pelakuyang terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap symbol. Apabilaterdapat perbedaan persepsi,

maka tujuan komunikasi dapat gagal.

2. Koordinasi, Silalahi (2011: 217) menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah yang sama.

5) Manfaat dan risiko

a. Saling berbagi manfaat diantara institusi.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut pandangan peneliti bahwa indikator saling berbagi manfaat diantara institusi sudah optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya objek wisata menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat karena objek wisata tersebut membuat produk untuk dijual dimana dalam proses produksinya membutuhkan tenaga manusia dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminto (2002: 125) bahwa:

“Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatanmemanfaatkan”

Berdasarkan teori diatas indikator saling berbagi manfaat diantara institusi berjalan dengan optimal. Masyarakat diuntungkan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan dengan memberdayakan

dalam produksi angklung dan kerajinan dari lidi, para pengelola atau pemilik pun diuntungkan dengan keberadaan masyarakat yang tanpanya tidak akan menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai jual.

b. Adanya penerapan manajemen dalam menyelesaikan berbagai risiko.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator penerapan manajemen dalam menyelesaikan berbagai risiko belum sepenuhnya optimal karena kurangnya pengarahan, perencanaan, pengorganisasi, serta penggunaan sumber daya di antara semua institusi. Tidak ada yang bergerak dan selalu menunggu institusi lain untuk memulai mengkoordinir berlangsungnya kolaborasi menghambat pengembangan wisata yang ada.

Hambatannya yaitu kurangnya inovasi dalam pengembangan wisata yang ada, pemerintah desa tidak memprioritaskan sektor pariwisata. Keterbatasan dana pengarahan juga menjadi salah satu faktor yang membuat kurangnya fokus dalam pengembangan wisata yang ada. Upaya yang dapat dilakukan ialah dilakukan tentu memiliki risiko dan manfaat oleh karena itu risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi dan dianalisa, kemudian dibuat strategi untuk mengurangi dampak potensial risiko yang dihadapi. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Kuncoro (2002: 99) bahwa: “Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”

6) Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan

a. Adanya ketersediaan dana, fasilitas dan promosi dalam pengembangan objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan dana, fasilitas, sarana, dan promosi dalam pengembangan objek wisata belum sepenuhnya optimal karena dalam berjalannya kolaborasi masih terdapat kekurangan dana atau permodalan keuangan karena hanya berasal dari dana desa yang terbatas dan harus terbagi dengan bidang yang lainnya dan tidak relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Choirul Saleh (2020: 48). Dengan melakukan kolaborasi maka setiap pihak akan bekerja sama untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh masing – masing institusi untuk mencapai keuntungan bersama.

Hambatan yang dihadapi ialah kurangnya penyertaan modal dari pemerintah desa berpengaruh terhadap berjalannya program BUMDES dan POKDARWIS.

Upaya yang melatarbelakangi kolaborasi dengan tujuan adanya penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya berupa pendanaan finansial, dukungan teknis (sarana dan prasana), promosi serta sumber daya lainnya. Sebagaimana

pendapat yang dikemukakan oleh Choirul Saleh (2020: 48) bahwa: “*Capital credibility* (kredibilitas pendanaan dan sumber daya material lainnya), yakni kemampuan seseorang/institusional dalam memberikan dukungan permodalan ataupun penyediaan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan kolaborasi.”

b. Adanya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan proses Kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan proses kolaborasi belum optimal karena anggota dalam kolaborasi belum mampu mengelola waktu akibat kesibukan masing – masing untuk memprioritaskan peran dan tanggung jawab sehingga struktur kepengurusan bersifat dan hanya gambaran hierarki saja tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.

Hambatan dalam indikator kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan proses kolaborasi ialah kuantitas serta loyalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan peran di masing – masing institusi dikarenakan kesibukan anggota (pengurus). Maka upaya yang dapat dilakukan ialah menata ulang kembali struktur kepengurusan sehingga tugas dan peran bukan hanya sebatas gambaran hierarki tetapi merupakan aksi nyata.

Hal ini sesuai dengan pendapat

oleh Greenstein (dalam Siti Zubaidah, 2019:2) bahwa “Keterampilan berkolaborasi (*Collaboration Skill*) merupakan keterampilan untuk berkerja sama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran, dan kemauandalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.”

KESIMPULAN

Hasil penelitian kolaborasi antar institusi dalam pengembangan wisata budaya dan religi di Desa Panyingkiran belum berjalan dengan optimal diukur berdasarkan unsur – unsur kolaborasi yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik yang yaitu 1) kerja sama; 2) intensitas; 3) jangka waktu; 4) kedudukan para pihak; 5) manfaat dan risiko dan 6) sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kerja sama antar instiusi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa belum ada komunikasi dan koordinasi, Sinergitas antara pemerintah desa dengan institusi internal di desa seperti BUMDES dan POKDARWIS tidak terlihat dengan maksimal karena terbatasnya kuantitas sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sehingga minimnya intensitas / keseringan dalam pelaksanaan rapat maupun evaluasi dari pengurus institusi sebagai anggota kolaborasi menjadikan tugas dan peran dalam pelaksanaan kolaborasi tidak berjalan dengan

maksimal. Tetapi untuk indikator saling berbagi manfaat sudah optimal karena pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar saling diuntungkan dikarenakan objek wisata memberikan kesempatan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alni Rahmawati, dkk. 2014. *Statistika Teori dan Praktek Edisi II*. Universitas. Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Dewi. 2011. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Dwiyanto, Agus 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.

Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Rosen, E.D. 1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. Sage

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) : alam Rangka otonomi Daerah*. Bandung: Bandar Maju.

Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.

Saleh Choirul. 2020. *MODUL 01 Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Zubaidah Siti. 2019,. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Vol. 3. No.2*

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.